

## **KAJIAN TELAAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI ERA OTONOMI DAERAH**

Djoharis Lubis

FT – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta  
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
djoharis.lubis@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Sebagian wilayah di Indonesia masih terdapat daerah tertinggal yang terdiri dari Komunitas Adat Terpencil, dimana KAT tersebut masih terkesan tertinggal dengan daerah yang lain. Daerah tertinggal tersebut memiliki sumber daya alam yang potensial, yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk dapat mensejahterakan komunitas-komunitas di dalamnya khususnya di bidang Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Untuk itulah di era otonomi daerah sekarang ini diperlukan penataan daerah tersebut yang akan terlaksana melalui koordinasi Integrasi, dan Sinkronisasi baik pada tataran kebijakan mikro strategis, makro operasional maupun kebijakan mikro strategis dan mikro operasional.

### **Kata Kunci:**

Pembangunan Daerah tertinggal, KAT, Otonomi Daerah

### **Pendahuluan**

Berdasarkan data dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dari 440 Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia terdapat 199 Daerah Tertinggal Selanjutnya. dari 69.955 jumlah Desa di seluruh Indonesia, 9.625 Desa diantaranya adalah Desa Tertinggal Dalam pada itu, berdasarkan data Direktorat Komunitas Adat Terpencil, Departemen Sosial, saat ini tercatat jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Indonesia sebanyak 267.550 KAT dan 8 Daerah Rawan Konflik. Dari angka-angka tersebut jelas terlihat bahwa Jumlah Daerah Tertinggal serta KAT di tanah air kita cukup besar yang ditandai antara lain oleh rendahnya aksesibilitas terhadap sentra-sentra pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, perumahan dan pemukiman yang layak, sumber-sumber permodalan, teknologi informasi serta pasar hasil-hasil produksi komoditi primer.

Sesungguhnya Daerah Tertinggal memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan serta dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat setempat ataupun sumber pendapatan Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Namun berdasarkan angka-angka BPS terlihat adanya ke-

senjangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat Daerah Tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya sehingga perlu diupayakan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan rakyat di Daerah Tertinggal tersebut.

Mengingat sebagian besar Pemerintah Daerah di beberapa Daerah Tertinggal memiliki keterbatasan dari segi pendanaan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia dan melihat berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal serta Departemen teknis terkait lainnya masih memerlukan peningkatan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi baik pada tataran kebijakan mikro strategis, makro operasional maupun kebijakan mikro strategis dan mikro operasional di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan serta pemecahan masalah sosial lainnya, maka dirasa perlu melaksanakan kajian / telaahan tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah tertinggal.

### **Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kajian tentang Pembangunan Daerah Tertinggal ini adalah:

- Menginventarisir permasalahan saat ini dan upaya pemecahannya dalam rangka mempercepat Peningkatan Pembangunan di Daerah Tertinggal
- Menghimpun hasil kajian / telaahan tentang Pembangunan Daerah Tertinggal
- Merangkum dan menyimpulkan hasil-hasil kajian/ telaahan yang dibahas dalam pertemuan koordinasi lintas Instansi.

Dalam rangka Kajian/ Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menggunakan metodologi sebagai berikut :

- Pengumpulan data ke lapangan dengan menggunakan metoda random sampling secara proporsional
- Pengumpulan data dilakukan di Provinsi dengan fokus Kabupaten yang Desa Tertinggalnya banyak seperti di Papua, NTT, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Utara

- c. Pengolahan data dilakukan dengan membuat Tabulasi Data dan menganalisisnya dengan menggunakan SWOT analisis
- d. Hasil analisa digunakan sebagai masukan dalam penyusunan laporan akhir
- e. Konsep laporan akhir dibahas dalam pertemuan koordinasi dengan instansi terkait

### **Pengertian Daerah Tertinggal**

Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten atau Desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Saat ini ada 199 Kabupaten/Kota masuk kategori tertinggal dan 9.625 Desa dari 69.955 Desa di Indonesia. Termasuk kategori Daerah tertinggal adalah Daerah Rawan Bencana, Rawan konflik, Daerah perbatasan Negara dan komunitas Adat Tertinggal. (Kompas, 2006).

### **Karakteristik dan Penyebab Daerah Tertinggal**

Suatu daerah disebut Daerah Tertinggal karena memiliki karakteristik yang menyebabkan daerah tersebut menjadi tertinggal yaitu :

- a. **Geografis**, umumnya secara geografis Daerah Tertinggal relative sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil karena factor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi. Sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain :
  - 1) Daerah yang terletak diwilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relative lebih maju;
  - 2) Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;
  - 3) Daerah yang secara administrative sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan antar Negara baik batas darat, maupun laut;
  - 4) Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, gunung api maupun banjir;
  - 5) Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.
- b. **Sumber daya alam**, beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam, daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah

yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.

- c. **Sumber daya manusia**, pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relative rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
- d. **Prasarana dan sarana**, keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- e. **Daerah rawan bencana dan konflik sosial**, seringnya suatu daerah mengalami bencana alam seperti kekeringan dan banjir, dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
- f. **Kebijakan pembangunan**, suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan Daerah Tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan. (Kompas, 2006)

### **Pembahasan**

#### **Kondisi Masyarakat di Daerah Tertinggal Setelah 5 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Sejak diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999, J.O. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Daerah belum optimal manfaat yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Hasil penelitian berikut ini memperkuat argument tersebut. berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan lima tahun Otonomi Daerah yang dilakukan harian "Kompas" dan dipublikasikan pada tanggal 2 Januari 2006, diperoleh informasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

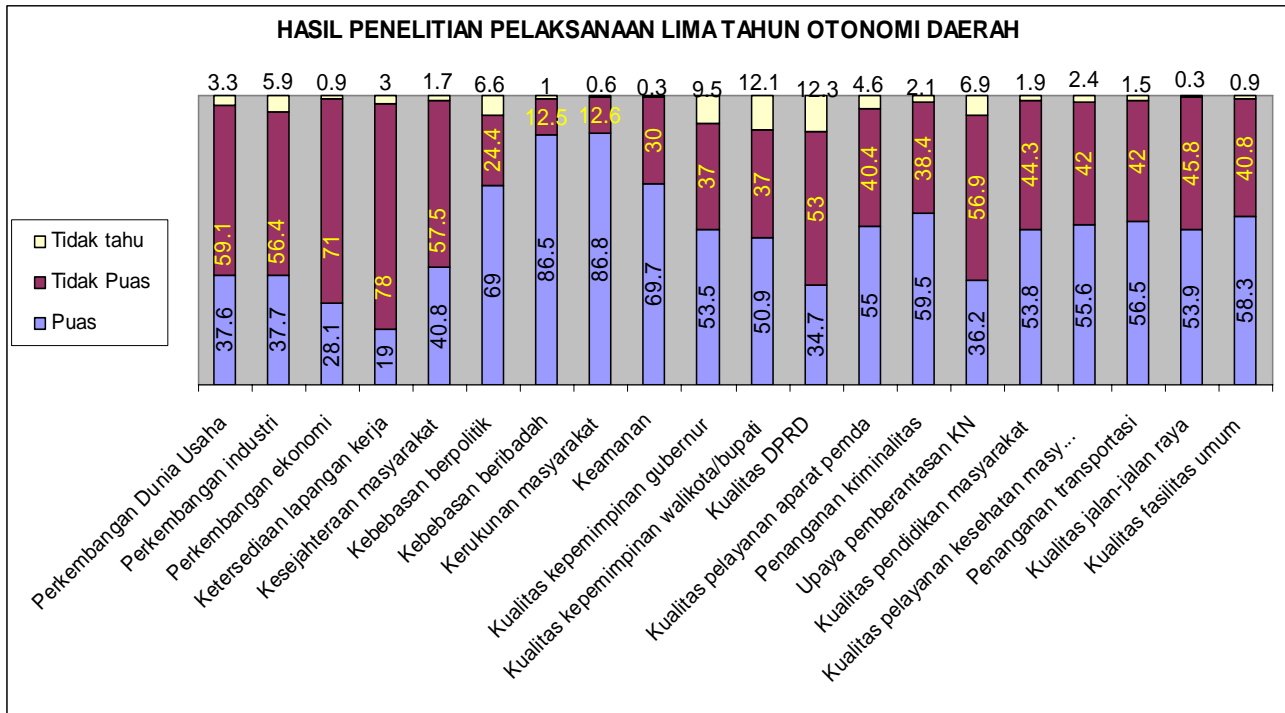
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1 dan Tabel 2, yang dilaksanakan di Jayapura, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Padang dan Medan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah diperoleh kesan antara lain lebih dari 50 % responden tidak merasa puas terhadap perkembangan dunia usaha, perkembangan industri, perkembangan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, kesejahteraan masya-

rakat, kualitas DPR dan upaya pemberantasan KKN.

Sementara itu lebih 50 % responden telah merasa puas terhadap kebebasan berpolitik, kebe-

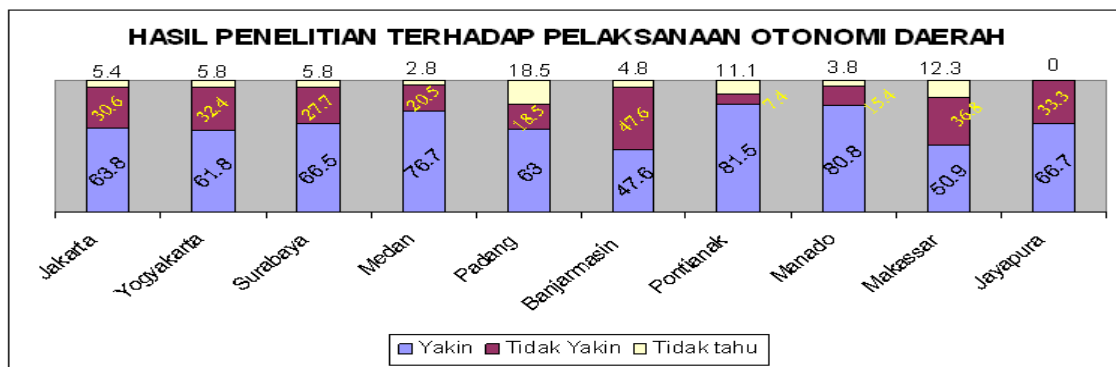
basan beribadah, kerukunan masyarakat, keamanan, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penanganan transportasi, kualitas jalan raya dan kualitas fasilitas umum.

Tabel 1  
Hasil Penelitian Pelaksanaan Lima Tahun Otonomi Daerah



Harian Kompas, 2 Januari 2006  
Sumber : Litbang Kompas n = 851  
Sampling error = +/- 3.4 %

Tabel 2  
Hasil Penelitian Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah



Harian Kompas, 2 Januari 2006  
Sumber : Litbang Kompas n = 851  
Sampling error = +/- 3.4 %

### Telaahan tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT)

KAT merupakan kelompok masyarakat dengan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Persebaran KAT sebagian besar di Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku Utara. Karakteristik wilayah KAT bervariasi sesuai dengan kondisi alamnya. Atas dasar tersebut, maka supaya percepatan pembangunan Kesra di KAT, harus mempertimbangkan 4 karakteristik wilayah dan kategori KAT dilihat dari segi permukimannya. 4 karakteristik tersebut yaitu:

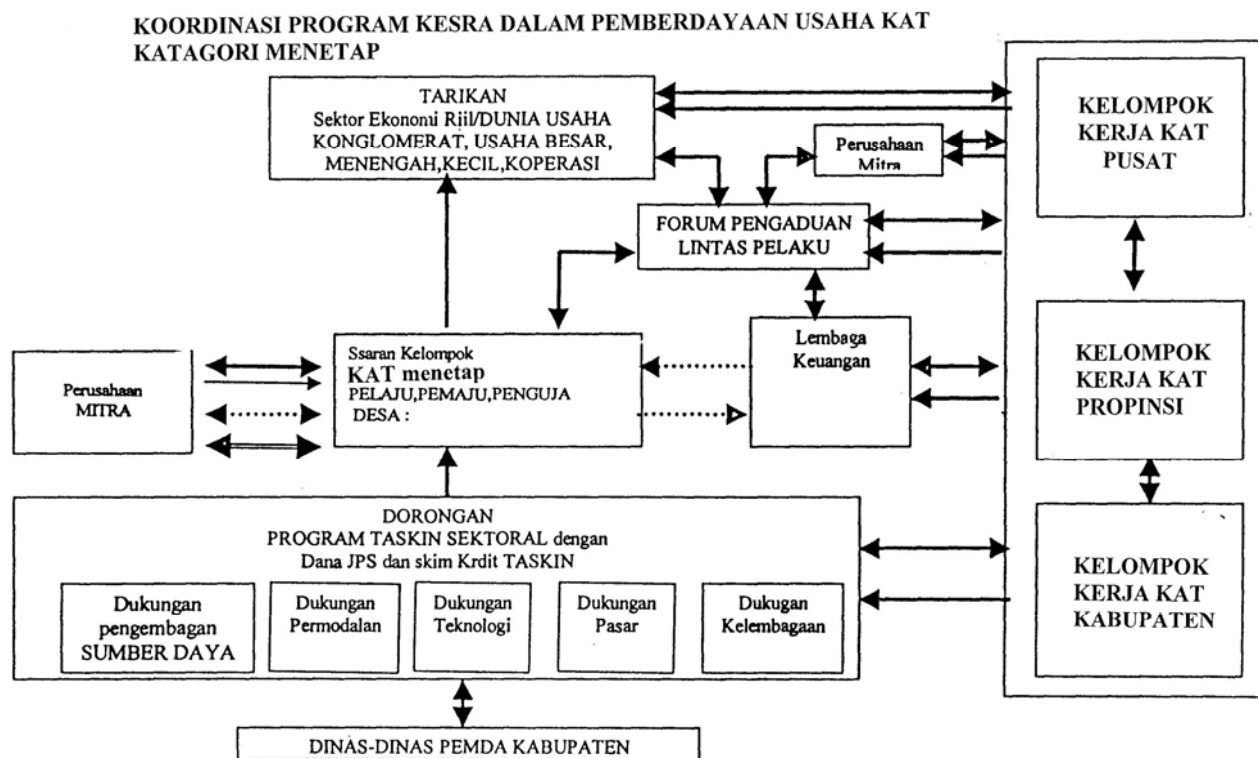
1. KAT yang tinggal di daerah DAS/pedalaman
2. KAT yang tinggal di dataran tinggi dan/daerah pegunungan
3. KAT yang tinggal di daerah pesisir dan pulau-pulau
4. KAT yang tinggal di daerah perbatasan

Program Kesra Yang terkait dengan KAT

1. Penghapusan kemiskinan
2. Peningkatan akses rakyat terhadap Pendidikan yang lebih berkualitas
3. Penghapusan ketimpangan di berbagai bentuk
4. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkunganhidup
5. Revitalisasi Pertanian dan pedesaan

Koordinasi Program Kesra Dalam Pengembangan KAT

1. Upaya menterjemahkan Program Kesra yang langsung dapat menyentuh KAT harus terpadu melibatkan multi stake holders, multidisiplin dan multi sector
2. Dalam era Otonomi Daerah, pengembangan KAT fokus simpul koordinasi di Bupati, sedangkan di Provinsi dan Pusat memfasilitasi forum multi stake holders di tingkat Kabupaten
3. Model-model koordinasi program kesra dalam pengembangan KAT dalam katagori menetap dapat dilihat bagan berikut ini:



Keterangan:  
 ↔ : Garis koordinasi  
 ↔ : Dukungan sumber daya  
 ↔ : Arus uang dan barang  
 → : Arus uang  
 → : Garis Pembinaan

Sumber: Kompas, 2006

## Telaahan Tentang Kesra di daerah konflik

Salah satu ciri-ciri Daerah Tertinggal adalah daerah yang lambat pembangunannya akibat adanya konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Implikasi terjadinya konflik tersebut berdampak terhadap rendahnya intensitas dan mobilitas

orang, barang dan uang karena rasa takut dan khawatir yang mengancam jiwa, keberlangsungan usaha dan pembangunan kesejahteraan rakyat. Daerah rawan konflik yang direkam dalam kajian ini yaitu daerah Provinsi Papua sebagai berikut:



Sumber: Kompas, 2006

Kondisi pembangunan Kesra di Papua setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus ditandai:

- APBN Papua naik dari Rp 648 M Tahun 2001 menjadi Rp 21.926 Triliun
- DANA OTSUS YANG DISALURKAN TAHUN 2002 S/D 2006 berdasarkan data dari Depdagri adalah sebagai berikut :
  - Tahun 2002 : Rp. 1.382 Triliun
  - Tahun 2003 : Rp. 1.530 Triliun
  - Tahun 2004 : Rp. 1.642 Triliun
  - Tahun 2005 : Rp. 1.775 Triliun
  - Tahun 2006 : Rp16,811 Triliun
- Namun Papua tetap menduduki posisi ke 14 dari Propinsi miskin di Indonesia dan jumlah penduduknya hampir 40 % hidup dibawah garis kemiskinan

- Sektor terkait dalam Koordinasi Kemenko Kesra saat ini sedang menginventarisir dana-dana Otsus, DAU dan DAK serta APBD dan APBN di Wilayah Perbatasan Papua. Hasil inventarisasi tersebut akan disampaikan ke Kemenko Kesra. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut akan dipetakan program beserta pendanaannya untuk bahan masukan dalam penentuan selanjutnya
- Mengingat kondisi beberapa Kabupaten didaerah perbatasan Papua hampir sama dengan Kabupaten Yahukimo, maka Model Pembangunan Kesra di Kabupaten Yahukimo direkomendasikan untuk direplikasikan di Kabupaten lainnya. Untuk itu sektor terkait diharapkan mempelajari dan mendukung Model pembangunan Kesra di Yahukimo tersebut
- Mempertimbangkan peranan tokoh-tokoh adat sangat berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat, maka dalam rangka Pembangunan Kesra di Papua dengan Negara tetangga perlu member-

- dayakan komunitas adat dan institusi adat serta dalam menyusun perencanaan yang partisipatif perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat guna membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai ada sekolah yang ditinggal guru atau Puskesmas yang tidak ada tenaga medisnya
- g. Hasil penelitian UNDP melaporkan ada kesenjangan mencolok antara pedesaan dengan perkotaan
  - h. Dana pembangunan sekolah berasal dari Pemerintah tanpa melibatkan masyarakat, akibatnya masyarakat tidak pernah merasa memilikinya
  - i. Masyarakat merasa dimarginalkan oleh Pemerintah akibatnya timbul reaksi tidak percaya kepada Pemerintah yang disikapi sangat berlebihan oleh Pemerintah Pusat
  - j. Sosial kontrol Pemerintah terhadap penggunaan dana dan pembangunan bagi masyarakat sangat terbatas, akibatnya timbul KKN yang berbuntut semakin tidak percayanya masyarakat kepada pejabat pemerintah

Tabel 3  
Alokasi anggaran tahun 2005-2006

Alokasi Anggaran Untuk Prov. Papua dan Prov. Irian Jaya Barat Tahun 2005-2006 (miliar rupiah)						
	2005			2006		
	Prov Papua	Prov. Irian Jaya Barat	Jumlah	Prov Papua	Prov. Irian Jaya Barat	Jumlah
<b>Alokasi melalui Belanja ke Daerah</b>	<b>5.727,8</b>	<b>2.021,2</b>	<b>7.749,0</b>	<b>11.337,4</b>	<b>4.344,7</b>	<b>15.682,1</b>
Dana Perimbangan	4.067,6	1.685,6	5.753,2	8.910,0	3.847,8	12.757,8
DBH	535,9	354,9	890,8	1.001,3	841,6	1.842,9
DAU	3.313,5	1.221,7	4.535,2	7.251,9	2.746,3	9.998,2
DAK	218,2	109,1	327,3	656,7	259,9	916,7
Dana Otsus dan Penyesuaian	1.660,1	335,6	1.995,7	2.427,4	496,9	2.924,3
Dana Otsus	1.512,5	262,9	1.775,3	2.416,4	496,9	2.913,3
Dana Penyesuaian	147,7	72,7	220,4	11,0	-	11,0
<b>Alokasi melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>969,4</b>	<b>326,9</b>	<b>1.296,3</b>	<b>788,0</b>	<b>341,4</b>	<b>1.129,3</b>
Dana Dekonsentrasi dan TP	599,5	274,1	873,6	662,2	329,0	991,1
Dana Dekonsentrasi	184,0	61,3	245,3	540,4	221,1	761,5
Dana Tugas Pembantuan	415,5	212,8	628,3	121,8	107,9	229,6
Bagian Anggaran 69	369,9	52,8	422,7	125,8	12,4	138,2
<b>TOTAL</b>	<b>6.697,2</b>	<b>2.348,1</b>	<b>9.045,2</b>	<b>12.125,4</b>	<b>4.686,1</b>	<b>16.811,5</b>

Ket: Untuk Tahun 2006 Dana Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua, termasuk Dana untuk menjaga kelancaran stabilitas prioritas kegiatan pembangunan sebesar Rp165,066 miliar

Sumber: Kompas, 2006

Berdasarkan tabel 4, terlihat jelas bahwa kenaikan alokasi anggaran Provinsi Papua dan Irian aya Barat tahun 2005 maka secara signifikan dari Rp. 9 Trilyun menjadi Rp. 16,8 trilyun pada tahun 2006. Namun kenaikan alokasi anggaran yang cukup tinggi tersebut belum diikuti dengan berkurangnya kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat

Papua. Untuk itu upaya percepatan Pembangunan Kesra melalui model-model percontohan pembangunan Kesra di daerah tingkat II perlu diciptakan disamping peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Tabel 4

Rincian Belanja Daerah per Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005-2006  
(Dalam Miliar)

NO	DAERAH	2005											
		Dana Perimbangan					Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian					Jumlah Total dari Belanja Daerah	
		DBH		Jumlah	DAU	DAK	Jumlah	Dana Otsus	Dana Penyesuaian				
Pajak	SDA	Murni	Adhoc						Jumlah				
I	Provinsi Papua	72,70	42,81	115,51	418,86	-	534,37	920,31	-	10,06	10,06	930,37	1.464,74
1	Kab. Biak Numfor	7,09	6,12	13,21	175,60	11,31	200,12	28,50	-	9,37	9,37	37,87	237,99
2	Kab. Jayapura	8,59	0,75	15,34	187,99	13,42	216,45	28,30	-	7,31	7,31	35,61	252,05
3	Kab. Jayawijaya	8,10	5,73	13,83	154,90	14,97	183,70	29,00	-	11,30	11,30	40,30	224,00
4	Kab. Merauke	12,81	6,11	18,92	277,38	16,45	312,75	28,50	-	8,73	8,73	37,23	349,98
5	Kab. Mimika	51,40	75,02	126,41	199,50	14,00	339,91	28,60	-	2,67	2,67	31,27	371,18
6	Kab. Nabire	12,60	8,97	21,57	226,31	16,71	263,59	29,00	-	7,00	7,00	36,00	299,59
7	Kab. Paniai	14,70	6,32	21,02	231,60	12,62	265,24	30,30	-	2,94	2,94	33,24	298,47
8	Kab. Puncak Jaya	8,46	5,77	14,23	214,66	8,66	237,55	30,30	-	1,53	1,53	31,83	269,38
9	Kab. Yapen Waropen	9,32	6,60	15,92	121,89	10,00	147,61	27,50	-	4,70	4,70	32,20	179,81
10	Kota Jayapura	19,66	5,65	25,31	186,59	8,59	220,49	27,10	-	7,33	7,33	34,43	254,92
11	Kab. Sarmi	9,08	6,18	15,26	122,83	8,65	146,74	30,25	-	4,36	4,36	34,61	181,35
12	Kab. Keerom	5,61	6,18	11,79	77,93	8,23	97,95	30,00	-	7,18	7,18	37,18	135,13
13	Kab. Yahukimo	5,72	5,85	11,57	109,74	9,15	130,26	31,50	-	10,92	10,92	42,42	172,68
14	Kab. Pegunungan Bintang	7,37	5,66	13,02	91,62	9,77	114,41	31,00	-	10,78	10,78	41,78	156,19
15	Kab. Tolikara	5,47	5,68	11,15	75,30	9,71	96,16	31,00	-	10,92	10,92	41,92	138,09
16	Kab. Boven Digoel	10,10	10,87	20,98	92,23	9,22	122,43	30,10	-	6,25	6,25	36,35	158,78
17	Kab. Mappi	7,74	5,65	13,39	103,37	10,55	127,31	30,10	-	6,48	6,48	36,58	163,89
18	Kab. Asmet	7,20	5,65	12,85	114,48	9,65	136,98	31,50	-	5,87	5,87	37,37	174,35
19	Kab. Waropen	9,85	6,51	16,36	109,01	8,58	133,95	30,10	-	6,14	6,14	36,24	170,19
20	Sugiri	2,81	5,65	8,46	23,20	8,00	39,66	29,50	-	5,83	5,83	35,33	74,99
	Jumlah	296,39	239,52	535,91	3.313,46	218,24	4.067,64	1.512,46	-	147,68	147,68	1.560,14	5.727,77
II	Provinsi Irian Jaya Barat	9,78	61,28	71,06	128,24	10,00	209,30	-	-	0,36	0,36	0,36	209,66
1	Kab. Sorong	9,64	42,07	51,71	138,24	17,33	207,28	29,00	-	12,32	12,32	41,32	248,59
2	Kab. Manokwari	4,69	34,06	38,75	188,67	14,74	242,16	28,30	-	12,91	12,91	41,21	283,37
3	Kab. Fak Fak	6,25	15,19	21,44	149,50	10,52	181,46	28,20	-	11,34	11,34	39,54	221,00
4	Kota Sorong	3,72	20,36	24,08	152,40	8,45	184,93	27,10	-	4,73	4,73	31,83	216,76
5	Kab. Sorong Selatan	3,72	27,50	31,22	130,12	8,48	169,82	29,50	-	7,16	7,16	36,66	206,48
6	Kab. Raja Ampat	5,63	16,99	22,62	68,57	10,62	101,81	30,75	-	6,72	6,72	37,47	139,27
7	Kab. Teluk Bintuni	3,91	10,84	14,75	108,34	9,62	132,71	30,00	-	5,42	5,42	35,42	168,13
8	Kab. Teluk Wondama	3,72	48,29	52,01	41,74	10,17	103,92	30,00	-	3,27	3,27	33,27	137,19
9	Kab. Kaimana	9,30	17,93	27,23	115,85	9,13	152,22	30,00	-	8,50	8,50	38,50	190,73
	Jumlah	60,35	294,51	354,86	1.221,68	109,05	1.695,60	262,85	-	72,73	72,73	335,58	2.021,18
	Jumlah Total	356,74	534,03	890,77	4.535,17	327,30	5.753,24	1.775,31	-	220,41	220,41	1.995,72	7.748,96

Sumber: Kompas, 2006

Tabel 5

Rincian Belanja Daerah per Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005-2006  
(Dalam Miliar)

NO	DAERAH	2006											
		Dana Perimbangan					Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian					Jumlah Total dari Belanja Daerah	
		DBH		Jumlah	DAU	DAK	Jumlah	Dana Otsus	Dana Penyesuaian				
Pajak	SDA	Murni	Adhoc						Jumlah				
I	Provinsi Papua	109,40	76,15	185,55	810,24	-	995,79	1.264,38	-	-	-	1.264,38	2.260,17
1	Kab. Biak Numfor	15,18	10,66	25,83	280,25	28,62	334,61	55,77	-	-	-	55,77	390,38
2	Kab. Jayapura	21,39	10,10	31,50	434,71	34,44	500,65	54,47	-	-	-	54,47	555,12
3	Kab. Jayawijaya	27,49	8,76	36,24	324,93	36,40	397,57	61,60	-	-	-	61,60	459,16
4	Kab. Merauke	28,35	10,60	38,95	534,97	40,14	614,06	55,31	-	-	-	55,31	669,37
5	Kab. Mimika	65,25	155,42	220,67	234,12	31,04	485,83	55,77	-	2,75	2,75	58,52	544,34
6	Kab. Nabire	23,64	20,41	44,05	360,11	29,14	433,30	53,11	-	-	-	53,11	486,41
7	Kab. Paniai	27,22	9,15	36,37	379,02	41,84	457,24	59,79	-	-	-	59,79	517,03
8	Kab. Puncak Jaya	19,81	8,77	28,59	321,77	40,36	390,74	61,15	-	-	-	61,15	451,89
9	Kab. Yapen Waropen	17,90	9,40	27,30	228,46	28,36	284,12	54,08	-	2,75	2,75	56,83	340,95
10	Kota Jayapura	22,54	8,62	31,16	294,15	14,08	339,39	52,06	-	-	-	52,06	392,05
11	Kab. Sarmi	20,65	10,37	31,02	426,02	29,91	486,94	57,58	-	2,75	2,75	60,33	547,28
12	Kab. Keerom	15,67	10,68	26,35	245,86	33,27	305,48	57,00	-	-	-	57,00	362,48
13	Kab. Yahukimo	16,27	8,62	24,90	325,43	29,18	379,51	61,80	-	-	-	61,80	441,30
14	Kab. Pegunungan Bintang	20,19	8,62	28,81	300,40	39,62	368,24	61,80	-	-	-	61,80	430,54
15	Kab. Tolikara	15,50	8,68	24,18	254,76	37,68	316,51	61,80	-	2,75	2,75	64,55	381,00
16	Kab. Boven Digoel	22,76	31,03	53,79	377,44	42,57	473,80	59,98	-	-	-	59,98	533,79
17	Kab. Mappi	19,75	8,62	28,37	337,33	28,65	394,35	59,72	-	-	-	59,72	454,08
18	Kab. Asmat	18,21	8,62	26,83	346,62	28,04	401,49	61,80	-	-	-	61,80	463,29
19	Kab. Waropen	21,71	9,70	31,41	271,50	20,53	323,44	56,09	-	-	-	56,09	379,53
20	Sugiri	10,84	8,62	19,46	163,81	43,16	229,43	50,71	-	-	-	50,71	277,14
	Jumlah	559,74	441,80	1.001,54	7.251,92	656,74	8.909,99	2.416,38	-	11,00	11,00	2.427,38	11.337,37
II	Provinsi Irian Jaya Barat	105,95	41,15	147,10	350,54	-	497,64	-	-	-	-	-	497,64
1	Kab. Sorong	86,90	57,73	143,73	258,37	33,32	435,42	53,56	-	-	-	53,56	488,99
2	Kab. Manokwari	71,76	19,11	90,86	325,78	35,34	451,98	54,47	-	-	-	54,47	506,45
3	Kab. Fak Fak	28,04	32,16	60,21	286,23	30,70	377,13	56,48	-	-	-	56,48	433,62
4	Kota Sorong	41,16	11,03	52,19	209,56	12,79	274,53	52,06	-	-	-	52,06	327,19
5	Kab. Sorong Selatan	51,91	11,03	62,94	363,53	26,68	453,15	57,00	-	-	-	57,00	510,15
6	Kab. Raja Ampat	34,95	37,11	72,06	216,16	31,38	319,60	55,77	-	-	-	55,77	375,37
7	Kab. Teluk Bintuni	89,76	12,70	102,55	262,99	27,70	393,33	64,73	-	-	-	64,73	448,06
8	Kab. Teluk Wondama	20,51	11,03	31,54	179,61	37,99	249,13	55,77	-	-	-	55,77	304,90
9	Kab. Kaimana	31,35	47,10	78,45	293,52	23,96	395,93	56,48	-	-	-	56,48	452,41
	Jumlah	561,39	280,23	841,61	2.746,29	259,95	3.847,85	498,92	-	-	-	498,92	4.346,77
	Jumlah Total	1.121,13	721,82	1.842,95	9.998,21	916,68	12.757,84	2.913,31	-	11,00	11,00	2.924,30	15.682,14

Keterangan:

- Dana Otsus bagian Provinsi Papua, termasuk dana untuk merajaga kelancaran stabilitas prioritas kegiatan pembangunan sebesar Rp165.066 miliar

Sumber: Kompas, 2006

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jelas bahwa total dana perimbangan dan dana otonomi Khusus serta dana penyesuaian yang tersebar diberbagai Kabupaten/Kota cukup besar yaitu tahun 2005 sebesar Rp. 7,7 Trilyun. Berhubung sarana jalan dan transportasi sebagian besar menggunakan angkutan udara, maka harga bahan-bahan pokok sangat mahal terutama di desa. Akibatnya rakyat di desa-desa kurang makanan bergizi. Untuk itu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta sarana dan prasarana jalan perlu mendapat prioritas.

### **Telaahan Tentang Pembangunan Kesra di daerah Perbatasan Negara**

Permasalahan Strategis di Wilayah Perbatasan Antar Negara.

1. Keteringgalan pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai dampak dari tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi dan keamanan apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di negara jiran.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar, transportasi darat dan laut serta telekomunikasi yang menyebabkan wilayah ini kurang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan kesempatan yang luas untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan
3. Pemekaran wilayah perbatasan khususnya di provinsi Riau, Kep Riau & KalBar belum diikuti dengan ketersediaan aparatur pemerintah sebagai pelaksana.
4. Terjadinya degradasi ekosistem alam dan lingkungan hayati dengan implikasi berkurangnya kesempatan untuk meningkatkan pendapatan bagi rakyat.
5. Sulitnya jangkauan informasi menyebabkan terjadinya kendala bagi pembinaan kesadaran berbangsa dan berbudaya Indonesia
6. Akibat cakupan pembangunan pendidikan yang masih rendah telah menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hukum yang akan menghambat percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat
7. Maraknya *illegal logging* dan *illegal fishing* oleh para pengusaha asing yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerawanan terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor serta berkurangnya pendapatan dari hasil kekayaan laut bagi para nelayan tradisional.
8. Peredaran produk-produk asing di kawasan perbatasan sebagai dampak globalisasi ekonomi menyebabkan produk lokal tidak mampu bersaing
9. Cakupan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat di wilayah perbatasan yang rendah telah menyebabkan kurangnya daya saing penduduk wilayah perbatasan.

### **Permasalahan spesifik bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan di daerah perbatasan negara**

1. Bidang kesehatan
  - a. Peran dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masih rendah
  - b. Pendataan yang cepat, tepat, akurat dan mengacu pada sistem informasi kesehatan yang komprehensif belum berjalan
  - c. Kuantitas dan kualitas SDM KES masih rendah dan Manajemen KES belum ditata dengan baik.
  - d. Sarana dan prasarana RSUD sebagai fungsi Yan Kes dan Dik Kes belum berjalan dengan lancar → kekurangan pendidik
  - e. Pembinaan dan pengendalian terhadap produk, obat-obatan dan bahan makanan yang beredar pada masyarakat masih rendah.
  - f. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya masih belum optimal selain sarana prasarana kuratif, rehabilitasi terhadap penyalahgunaan NAFZA masih kurang.
2. Bidang Pendidikan
  - a. Kemampuan Pemda pada sektor pendidikan masih rendah
  - b. Pemahaman tentang SISDIKNAS masih belum optimal menyebabkan kurang terakomodasinya berbagai masalah dan yang diperlukan
  - c. Desentralisasi pendidikan kurang berjalan dengan baik, karena berbagai keterbatasan, terutama SDM yang menangani pendidikan, dan kendala sistem birokrasi
  - d. Akuntabilitas pendidikan belum berjalan dengan baik
  - e. Akses masyarakat pedesaan dan GAKIN untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas masih sangat terbatas
3. Bidang Ekonomi Kerakyatan

Lemahnya upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama disektor hilir dan belum optimalnya upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM



### **Kendala – Kendala Peningkatan Kesra di daerah Perbatasan Negara**

1. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang kesejahteraan rakyat belum optimal dalam artian penetapan prioritas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan tidak direalisasikan dengan baik dan benar sebagai implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah
2. Realisasi pembangunan di wilayah perbatasan negara masih lebih difokuskan pada bidang pertahanan dan keamanan dibanding bidang kesejahteraan rakyat, implikasinya pembangunan SDM di wilayah perbatasan terhambat akibat rendahnya anggaran bagi sektor pembangunan pendidikan dan kesehatan
3. Perhatian terhadap perencanaan untuk memajukan kawasan perbatasan masih belum fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem pendidikan dan pemberdayaan koperasi, UMKM
4. Supremasi hukum yang masih lemah di wilayah perbatasan telah menyebabkan maraknya illegal fishing, dan illegal trading, kondisi ini merupakan penghambat laju pertumbuhan ekonomi rakyat
5. Infiltrasi budaya negara jiran ke wilayah perbatasan NKRI telah mempengaruhi perkembangan mutu pendidikan dan proses pembelajaran anak didik

### **Pengaruh Ling-Stra, Peluang dan Kendala**

- Intemasional: Globalisasi Teknologi, Informasi, Transportasi, Liberalisasi Ekonomi
- Regional: ASEAN Free Trade Area, General Border Committee SIJORI (Singapore, Johor, Riau Committee on Trade) Otonomi Daerah
- Nasional: Otonomi Daerah

### **KONSEPSI (Kebijakan, Strategi dan Program Peningkatan Kesra di Daerah Perbatasan Negara)**

#### **Kebijakan:**

1. Bidang Kesehatan  
Percepatan pembangunan kesehatan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat guna merealisasikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) antara lain dengan :
  - a. Melaksanakan pendataan yang mengacu pada informasi kesehatan yang tepat, akurat dan komprehensif
  - b. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dan penerapan manajemen pembangunan kesehatan yang terintegrasi

- c. Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan produk obat-obatan dan bahan makanan melalui pembinaan. Pengawasan yang intensif
  - d. Memberdayakan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana kuratif dan rehabilitatif
  - e. Mengembangkan RSUD menjadi RS pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terakreditasi dengan beberapa jenis layanan yang mampu mendukung penyiapan SDM yang berkualitas di bidang kesehatan
2. Bidang Pendidikan  
Percepatan pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan dengan:
    - a. Penyediaan buku pokok dan buku penunjang pada pendidikan kanak-kanak, dasar, menengah dan pendidikan luar sekolah
    - b. Meningkatkan angka partisipasi anak-anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan di daerah terpencil, terisolir dan marjinal
    - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar pada seluruh tingkatan sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan
    - d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan bagi USIa dini dan penyandang cacat (SDLB dan SLB)
    - e. Meningkatkan peran dan fungsi Balai Pelatihan Guru (BPG), Balai Pelatihan Kegiatan Belajar (BPKB), Balai Teknologi Pendidikan (BPT), serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
    - f. Pembinaan dan pengembangan serta penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan
    - g. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan pendidikan antara pemerintah, pemda dan swasta
    - h. Mengadakan kegiatan yang dapat melestarikan budaya lokal
  3. Bidang Ekonomi Kerakyatan  
Percepatan peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan:
    - a. Penguatan struktur kesra di wilayah perbatasan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat terutama di sektor hilir. Perluasan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar serta transport dan komunikasi dengan mengikuti peran dunia usaha
    - b. Peningkatan akses pembangunan koperasi, DMKM dengan membangun industri kecil pengolahan hasil produk unggulan di hilir
    - c. Pembentukan zona-zona industri kecil,

menengah dan koperasi desa dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang dikelola secara profesional

- d. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan pembentukan zona-zona industri menengah, kecil dan mikro serta koperasi dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara bertanggung jawab dan profesional

### **Strategi Peningkatan Kesra di Wilayah Perbatasan Negara**

1. Bidang Kesehatan
  - a. Pemberdayaan masyarakat dengan merevitalisasikan masyarakat luas agar hidup sehat dan merealisasikan "Desa Siaga"
  - b. Peningkatan kapasitas SDM Kes, Peralatan, Mekanisme Kerja, Duk Log Kes dengan cara membuat Nota Kesepahaman (MoD) antar Pemda
2. Bidang Pendidikan
  - a. Peningkatan kemampuan dan jumlah tenaga pengajar serta mutunya
  - b. Pembangunan sekolah umum dan kejuruan, madrasah serta sarana pendidikan lainnya melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoD) antar Pemda
3. Bidang Kerakyatan
  - a. Perluasan kesempatan kerja  
Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan kelapa sawit, perikanan, peternakan dan perunggasan  
Pendampingan pada pemberian kredit mikro

### **Program Peningkatan Kesra di Wilayah Perbatasan Negara**

1. Bidang Kesehatan
  - a. Pembangunan sarana air bersih, rumah sehat dan jamban keluarga
  - b. Pembangunan Puskesmas, Puskesmas keliling Terapung, Pondok Bersalin
  - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui revitalisasi Posyandu dan revitalisasi surveilans epidemiologi
  - d. Penambahan jumlah dokter, bidan, sarjana kesehatan masyarakat, ahli gizi dan tenaga sanitasi
2. Bidang Pendidikan
  - a. Pengembangan pendidikan kejuruan pertanian dan industri kecil serta usaha mikro
  - b. Peningkatan kerjasama bidang pendidikan an-

tar daerah dan negara lingkup ASEAN dengan membuat sekolah di perbatasan antar negara (*Border School*)

- c. Pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang persatuan dan kesatuan NKRI
  - d. Pendidikan dan pengembangan budaya lokal
  - e. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan bersifat bergerak
  - f. Penambahan guru dan sekolah di wilayah perbatasan
  - g. Pemberian insentif kepada investor di bidang kesehatan dan pendidikan melalui kebijakan fiskal pemerintahan
  - h. Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - i. Pelatihan tenaga terampil (*life skill education*)
3. Bidang Ekonomi Kerakyatan
    - a. Peningkatan dan pengawasan mutu dan produk usaha kecil, menengah dan mikro yang diperdagangkan
    - b. Peningkatan ketahanan pangan desa
    - c. Pembangunan sarana perumahan rakyat berupa Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana dan Sewa (RUSUNA WA)
    - d. Peningkatan manajemen pengawasan perbatasan
    - e. Pembangunan jejaring telekomunikasi dan informasi
    - f. Pembangunan Pos Lintas Batas tambahan yang dilengkapi dengan Karantina, Imigrasi, Bea Cukai dan Keamanan untuk memantau dan mengawasi terjadinya penyebaran penyakit dan masalah sosial lainnya

### **Permasalahan Umum Pembangunan di Daerah Tertinggal**

Secara umum ada beberapa permasalahan dalam pembangunan Daerah Tertinggal yaitu :

1. Belum tersentuh Program Pembangunan Masyarakat yang berada di Daerah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan program masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Daerah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain:

- a. batasnya akses transportasi yang menghancurkan Daerah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju;
  - b. Kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar;
  - c. Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia;
  - d. Belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapat asli Daerah (PAD) secara langsung;
  - e. Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.
2. Belum dikembangkan Wilayah-wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain :
- a. Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
  - b. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
  - c. Belum optimalnya dukungan kebijakan Nasional dan Daerah yang berfihak pada petani dan pelaku usaha swasta;
  - d. Belum berkembangnya infrastruktur kelembangaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
  - e. Masih lemahnya kordinasi, strategi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
  - f. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
  - g. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah;
  - h. Serta belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antara wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Sebenarnya, wilayah strategis dan cepat tumbuh ini dapat dikembangkan secara lebih cepat, karena memiliki produk unggulan yang berdaya saing. Jika sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah—wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang.

3. Terbatas Akses di Wilayah perbatasan dan Terpencil.

Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil tertular memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pengembangan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di Wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tertinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi Warga Negara Tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi ‘*inward looking*’ sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Ketidakseimbangan pasokan sumberdaya alam dengan kebutuhan pembangunan. Persoalan ini mencuat pada 5 tahun terakhir ini diakibatkan oleh bencana alam, penjarahan hutan, dan pengrusakan lingkungan yang berakibat pada semakin menurunnya daya pasok air baik untuk kebutuhan manusia maupun untuk yang mayoritas masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan. Dijarah dan digundulinya hutan lindung berakibat pada semakin tipisnya persediaan air bawah tanah dan terjadinya banjir. Keadaan ini menjadikannya daerah tertinggal me-

masuk ke wilayah bencana, lahan kering, dan rawan banjir.

Untuk mengefektifkan penanganannya, maka berbagai kondisi masalah di atas dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek masalah yaitu :

1. Permasalahan berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal;
2. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Permasalahan berkaitan dengan Kapasitas Kelembagaan;
4. Permasalahan berkaitan dengan Prasarana dan Sarana;
5. Permasalahan berkaitan dengan Karakteristik Daerah.

### **Aspek Pengembangan Ekonomi Lokal**

Permasalahan aspek Pengembangan Ekonomi Lokal meliputi:

- a. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
- b. Rendahnya ketrampilan manajemen usaha
- c. Kurangnya permodalan untuk pengembangan usaha
- d. Kurangnya peralatan dan teknologi untuk kegiatan produksi masyarakat
- e. Tidak kontinyunya distribusi bahan-bahan pendukung produksi.
- f. Terbatasnya akses dan sarana pemasaran untuk perluasan pasar.

### **Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Permasalahan aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :

- a. Rendahnya kualitas pendidikan dan fasilitasnya menyangkut guru, bangunan sekolah, kurikulum, dan laboratorium.
- b. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat
- c. Kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis/paramedis
- d. Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman
- e. Kurangnya prasarana dan sarana peningkatan ketrampilan tenaga kerja.

### **Aspek Kelembagaan**

Permasalahan aspek kelembagaan meliputi :

- a. Umumnya lembaga terbentuk secara non formal tanpa memiliki struktur organisasi dan anggaran dasar dan rumah tangga.
- b. Lembaga yang terbentuk secara formal dan mempunyai hierarki organisasi, umumnya belum

mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, dan program serta rencana kerja secara jelas.

- c. Lembaga belum mempunyai pengaturan mekanisme kerja internal dan eksternal.
- d. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan lembaga
- e. Rendahnya kemampuan pengurus dalam memahami, menjabarkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga.
- f. Terbatasnya prasarana dan sarana pendukung yang dimiliki lembaga, baik berupa prasarana kantor, fasilitas dan sarana kerja.
- g. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk melaksanakan program dan kegiatan lembaga.
- h. Terbatasnya informasi dan jaringan kerja yang dimiliki oleh lembaga.

### **Aspek Prasarana Sarana**

Permasalahan aspek prasarana dan sarana meliputi :

- a. Kurangnya prasarana dan Sarana transportasi darat, laut, dan udara
- b. Rendahnya kualitas air bersih dan sulitnya akses dalam mendapatkan air bersih.
- c. Permasalahan prasarana dan sarana irigasi sebagai penyedia air untuk produksi pertanian
- d. Permasalahan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- e. Permasalahan penataan dan penyediaan perumahan masyarakat.

### **Aspek Karakteristik Daerah**

**Permasalahan aspek karakteristik daerah meliputi :**

- a. Seringnya terjadi bencana banjir baik yang ada di area pemukiman maupun area produksi (sawah/ladang/tambak, dan lain-lainnya).
- b. Seringnya terjadi permasalahan sosial, terutama kelaparan dan kekurangan pangan.
- c. Seringnya terjadi bencana alam longsor/erosi/abrasi.
- d. Banyaknya lahan kritis dan kerusakan lingkungan
- e. Terjadinya konflik sosial yang menjadi faktor penghambat proses pembangunan.
- f. Beberapa daerah mengalami masalah kebakaran yang telah melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Disamping permasalahan mendasar tersebut, terdapat pula beberapa permasalahan yang bersifat spesifik terutama di daerah perbatasan yang mencakup:

- a. Aspek penyelesaian demarkasi dan deliniasi batas, serta
- b. Aspek politik, hukum dan keamanan

c. Aspek Penyelesaian Demarkasi dan Deliniasi Batas

Permasalahan aspek penyelesaian demarkasi dan deliniasi batas meliputi :

- a. Belum dirundingkan dan disepakatinya beberapa segmen garis batas dengan Negara Tetangga batas darat maupun batas laut
- b. Beberapa titik dasar di pulau-pulau kecil terluar belum ditetapkan
- c. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung bagi penetapan batas wilayah Negara secara menyeluruh.
- d. Belum tertatanya tanda fisik batas antara Negara.

Permasalahan aspek Politik, Hukum dan Keamanan diantaranya :

- a. Meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam secara tidak terkendali, seperti penebang kayu ilegal, Penambangan pasir laut, serta pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing di perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).
- b. Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar
- c. Adanya potensi sengketa wilayah dengan Negara Tetangga yang mengancam kedaulatan wilayah Negara akibat belum adanya kesepakatan batas darat dan laut.
- d. Terbatasnya prasarana dan Sarana perbatasan.

Disamping Permasalahan tersebut di atas beberapa masalah yang menghambat Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah :

1. Kurang perhatian Pemda karena sedikit menghasilkan PAD
2. Lemahnya KWALITAS SDM
3. Terbatas Saran dan Prasarana
4. STRANAS PDT belum menjadi Rujukan Sektor, Prov, Kabupaten atau K/L dalam PDT karena belum memiliki dasar legalitas yang kuat dapat dipacu oleh K/L terkait.
5. Belum ada kejelasan tentang bagaimana menindaklanjuti STRANAS PDT
6. Belum ada Pedoman/Komitmen bersama yang mengikat untuk menserasikan kebijakan K/L terkait dalam pembangunan PDT
7. Sulitnya Koordinasi Lintas Instansi Pusat dan Daerah
8. Duplikasi Fungsi
9. Belum ada formula “Cost Sharing”

## Analisa SWOT Pembangunan di Daerah Tertinggal

Berdasarkan data dan Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai Instansi baik di Pusat maupun di daerah, dalam laporan ini dilakukan SWOT analysis terhadap tiga Aspek Kunci yang berperan strategis dalam mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu:

1. Aspek Konsepsi, Kebijakan dan Program
2. Aspek Kelembagaan
3. Aspek Pendanaan

Hasil SWOT analisis tersebut dapat di lihat pada Matrik di bagian lampiran.

## Kesimpulan

Untuk Papua:

1. Untuk membuka keterisolasian Wilayah Papua utamanya Kabupaten – Kabupaten di Pegunungan Tengah dan Selatan Papua, Kementerian Koordinator Bidang Kesra akan membuat model Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten-Kabupaten Tolikara, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Puncak Jaya, Panai, dan Yahukimo yang melibatkan berbagai Departemen dalam satu Tim Koordinasi Lintas Departemen secara Terpadu
2. Perlu penyusunan rencana yang partisipatif melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang disepakati bersama (*Sense of Planning Ownership*)
3. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui perencanaan sektoral yang terintegrasi dengan melibatkan masyarakat pedesaan
4. Meningkatkan kualitas SDM dan institusi DPR daerah. UNDP akan membantu pengadaan *Technical Assistance* dan *Financial TA*
5. Meningkatkan kapasitas Media yang focus tentang *Equity Issue* di Papua
6. Memberdayakan komunitas adat dan institusi adat
7. Meningkatkan kemitraan pemerintah dengan negara donor dalam pembangunan jangka panjang untuk membangun meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
8. Pemerintah perlu mendorong Pemda meningkatkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat karena temuan di lapangan dan pendidikan hanya 4 % dari APBD

Dalam hal peningkatan Kesra di wilayah perbatasan negara:

- a. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di

- wilayah perbatasan sangat diperlukan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal
- b. Diperlukan adanya Perundang Undangan Legislasi yang mengatur batas wilayah perbatasan NKRI
  - c. Diperlukan institusi yang khusus mengelola wilayah perbatasan secara intensif
  - d. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan agar mengikut sertakan dan memberdayakan semua pemangku kepentingan termasuk kalangan dunia usaha
  - e. Fokus pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan dengan mendirikan sekolah dengan asrama, penempatan guru berkualitas, distribusi tenaga kesehatan secara merata, menguatkan lembaga perbankan bagi kredit mikro dan pendampingan

Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal:

1. Perlu Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai Payung koordinasi Implementasi Program PDT.
2. Re fungsi Institusi Pemda untuk meningkatkan Proporsi alokasi anggaran untuk Pembangunan Daerah Tertinggal yang PAD kecil di daerahnya.
3. Perlu Peraturan Menteri Keuangan untuk Formula “ *Cost Sharing* “ dalam rangka PDT.

4. Anggaran PDT Sektoral dimasukkan dalam DAK agar Bupati bertanggung jawab.
5. Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang LPJ Bupati yang muatannya berisi kinerja Bupati tentang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai pertanggung jawaban Bupati tentang Pembangunan Kesra di Daerah Tertinggal.
6. Untuk membuka Keterisolasian Daerah Tertinggal, porsi dana untuk Pembangunan Tenaga Listrik Mikrohydro, sarana jalan/ transportasi dan komunikasi ditingkatkan.
7. Peningkatan porsi alokasi dana untuk prasarana serta sarana Pendidikan, Kesehatan, serta pembangunan sentra-sentra produksi dan pasar guna membangun ekonomi kerakyatan.

### Daftar Pustaka

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan beberapa Kabupaten di Provinsi Papua.

Inpres Nomor 5 tahun 2007 Tentang Mempercepat Pembangunan di Papua.

Kompas, 2 Januari 2006.

## LAMPIRAN

### Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah

NO	ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS (Kelemahan)	OPPORTUNITY (Peluang)	THREAT (Tantangan)
I.	Konsepsi, Kebijakan, dan Program	1) Sudah ada UU.No 32 dan 33 Tahun 2005 yang mengatur pembagian urusan pusat dan daerah ( <i>CONCURENT</i> ) 2) Sudah ada RPJM, Renstra, Renstrada, Program dan RKP Tahun 2006 sampai 2007 3) Arahan Menko Kesra dan Meneg PDT yang jelas dan terarah 4) Paradigma Baru Kesra Memandang Dana sebagai Investasi Pengembangan SDM	1) Belum ada Rencana Aksi Nasional PDT yang dikukuhkan dengan Inpres yang mengatur siapa mengerjakan apa, tentang apa dan di mana serta bagaimana ? 2) Masing-masing Kabupaten mengajukan anggaran ke sektor dan Renstrada ke Meneg PDT mengakibatkan kerancuan anggaran dan perencanaan 3) STRANAS PDT belum menjadi Rujukan Sektor, Prov, Kabupaten atau K/L dalam PDT karena belum memiliki dasar legalitas yang kuat yang dapat diacu oleh K/L terkait 4) Belum ada kejelasan tentang bagaimana menindaklanjuti STRANAS PDT 5) Belum ada pedoman / komitmen bersama yang mengikat untuk menserasikan kebijakan K/L terkait dalam pembangunan PDT	1) Political Will pemerintah yang kuat 2) Sudah ada RPJM, Renstra, Renstrada, Renstra Sektoral dan Pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta Kebijakan Pembangunan Manusia Indonesia 3) Konsep RAN PDT sudah ada yang telah dibahas lintas Departemen serta mendapat dukungan Menko Kesra melalui surat No. B.65/Menko Kesra/IV 2007 tanggal 6 April 2007 kepada Menteri Negara Sekretaris Kabinet dan Meneg PPN/Ketua Bappenas	1) Eforia Demokrasi 2) Kegamangan Pemerintah Pusat Melakukan Pengawasan Terhadap Daerah 3) Belum jelas pembagian Tanggung Jawab Pendanaan secara Formal, serta Sharing, Pendanaan dalam Pelaksanaan Peningkatan Kesra di Daerah Tertinggal Misalnya : Kelaparan di Yahokimo dan NTT 4) Forum Kordinasi yang ada belum efektif untuk melaksanakan kebijakan dan program PDT yang ada.
II	Kelembagaan	Secara formal sudah ada Kementerian Negara PDT sebagai Lembaga Koordinasi Lintas Sektor.	1) Lembaga Koordinasi yang ada belum Efektif 2) Di Daerah tidak ada Dinas yang khusus menangani PDT	1) Adanya " <i>Political Will</i> " Pemerintah yang kuat dalam PDT 2) Berbagai Departemen Teknis memiliki Program PDT	1) Kemenko Kesra maupun Meneg PDT tidak punya Kelembagaan Perwakilan di Daerah yang menangani PDT 2) Tim Koordinasi yang ada belum menampung keseluruhan Program PDT dan belum Optimal Hubungan Kerjanya dengan Instansi Daerah
III	Pendanaan	1) Dana Pusat dan Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal cukup memadai. Di Papua dan NAD 2) Setiap tahun dana untuk PDT naik secara signifikan	Pemda Provinsi dan Kabupaten memberikan Proporsi dana PDT yang dialokasikan di APBD sangat terbatas	1) Pemerintah dan DPR mempunyai <i>Political Will</i> yang kuat untuk Meningkatkan Jumlah Dana bagi PDT 2) Adanya KMK 35 Tahun 2003 mendorong Daerah untuk <i>Sharing</i> Pendanaan Daerah tertinggal	1) Peluang Kebocoran Dana PDT dengan Pola Kerja sekarang cukup besar disebabkan kurang tersedia Petugas Pengawasan di lapangan terutama di daerah terpencil 2) Kegamangan Pemerintah Pusat dalam menyikapi Otoritas Otonomi Daerah. Misalnya dalam mengawasi Penyaluran Dana-

- Dana Otonomi Khusus Papua, khawatir gejala Politik semakin meruncing sudah hampir 5 tahun pelaksanaan Otsus belum pernah dilakukan Evaluasi.
- 3) Munculnya Mekanisme Kolaborasi dari Eksekutif Legislatif Daerah untuk kepentingan kelompok tertentu
- 4) Belum jelas secara formmal pembagian Tanggung Jawab Sharing Pendanaan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota
- 5) Para Eksekutif maupun legislatif Daerah belum mampu untuk membangun Cheks and Balance yang sehat dalam Pembangunan Daerah Tertinggal.

#### TELAAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI ERA OTONOMI DAERAH

NO	ASPEK	Strategis Meningkatkan Kekuatan dan Mengurangi Kelemahan untuk Memanfaatkan Peluang dan menghadapi tantangan	Strategi Memanfaatkan Peluang untuk Menghadapi Tantangan
I.	Konsepsi, Kebijakan dan Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Aksi Nasional PDT yang dikukuhkan dengan Inpres.</li> <li>2. RAN PDT dengan Pendekatan Karakteristik dan Potensi Daerah.</li> <li>3. Di buat Pedoman yang mengatur kewajiban masing-masing. K/L, Provinsi, Kabupaten, dll. Menguji ketertinggalan PDT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan RUU atau RPP tentang LPJ Kepala Daerah yang memuat kinerja Kepala Daerah yang memuat Kinerja Kepala Daerah Tentang Pelaksana RAN PDT.</li> <li>2. Menyusun Sistem pengawasan yang Akuntable dan Transparan, melibatkan unsur – unsur dari Pusat dan Daerah dilandasi Peraturan Perundang – undangan yang ada</li> </ol>
II.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Kementerian Negara PDT dengan pendekatan Regional yang mempunyai tugas kebijakan, Program dan pelaksanaan serta pemantauan dan Evaluasi Program – program PDT di Daerah.</li> <li>2. Memperkuat dan Mengembangkan forum – forum koordinasi dalam rangka membangun daerah tertinggal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memebantuk Team Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal diperkuat dengan unsur – unsur yang mewakili berbagai pemangku kepentingan baik di Pusat maupun di Daerah</li> </ol>
III.	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Proram Kesra didukung dengan Pendanaan Sharing Pemerintah Propinsi dan Kabupaten melalui sistem <i>Matching Grand</i> (KMK No. 35/2003) atau “<i>Cost Sharing</i>”</li> <li>2. Mekanisme perencanaan dan pengawasan dengan pola “One Step Service”</li> </ol>	